

Birokrat dan Pilkada: Motif Pencalonan Birokrat dalam Pilkada Lombok Tengah Tahun 2020

Aditya Suprayatma^{1*}, Nurul Nurhandjati²

*Corresponding Author: aditya.suprayatma@ui.ac.id

^{1,2} Universitas Indonesia

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v10i1.34224

This research analyzes or examines the factors that cause bureaucrats to nominate themselves as regional head and deputy head candidates in the 2020 Central Lombok regional elections. The phenomenon of many bureaucrats resigning from their positions to become candidates in the Central Lombok regional elections in 2020 is interesting to study. Randall's Recruitment Theory of Political Parties, Patron-Client Theory, and Motive Theory are used in the candidacy process to examine this issue. The research method used is explanatory qualitative. The study's findings indicate motives and support, as well as opportunities for bureaucrats to participate in the nomination process in the regional elections. The motives of bureaucrats to resign from their positions and choose to participate in the regional election candidacy are more because they want to expand their power and reproduce economic resources, pragmatism, and social prestige. The implications of this study's theory confirm that the motives of bureaucrats to choose to resign and become candidates in the regional elections cannot be separated from political support factors from political parties, businessmen, and local elites.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis atau mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan birokrat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala pada pilkada lombok tengah tahun 2020. Fenomena maraknya para birokrat mengundurkan diri dari jabatannya untuk menjadi kandidat dalam Pilkada di Lombok Tengah tahun 2020 menarik untuk diteliti. Untuk mengkaji permasalahan tersebut digunakan teori Rekrutmen partai Politik dari Randall, Teori Patron-Klien dan Teori Motif dalam proses kandidasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif eksplanatif. Temuan penelitian menunjukkan adanya motif dan dukungan serta peluang untuk birokrat mengikuti proses pencalonan dalam Pilkada. Motif para birokrat memilih mengundurkan diri dari jabatannya dan memilih mengikuti kandidasi Pilkada lebih karena ingin memperluas kekuasaan, reproduksi sumber daya ekonomi, pragmatisme dan prestise sosial. Implikasi teori studi ini mengkonfirmasi bahwa motif birokrat memilih mengundurkan diri menjadi kandidat dalam Pilkada tidak dapat dilepaskan dari faktor dukungan politik terhadapnya baik dari partai politik, pengusaha maupun elit lokal.

Keywords

Birokrat, Kandidasi, Lombok Tengah, Patron-Klien, Pilkada

Article History

Received May, 10

Revised May, 23

Accepted May, 31

Published June, 30

Corresponding Author

Aditya Suprayatma.
Universitas Indonesia.
Jl. Lingkar, Pondok Cina,
Kecamatan Beji, Kota Depok,
Jawa Barat 16424

Pendahuluan

Birokrasi berasal dari kata Perancis "bureau" (meja tulis) dan Yunani "kratos" (pemerintahan). Awalnya, birokrasi berarti sekumpulan pekerja kantor, tetapi konsepnya berkembang seiring dinamika ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konteks politik, birokrasi adalah alat pemerintah untuk melaksanakan kebijakan. Max Weber mendefinisikan birokrasi sebagai organisasi yang terstruktur dan impersonal dengan hierarki, aturan, dan batas otoritas yang jelas, menekankan legal-rasional sebagai sumber kewenangan.

Tokoh-tokoh seperti Blau, Page, Meyer, dan Bintoro Tjokromidjojo juga meneliti birokrasi. Weber menganggap birokrasi ideal harus rasional dan berbasis kriteria objektif, bukan relasi pribadi. Birokrasi memiliki fungsi mengatur dan melayani masyarakat, serta administrasi.

Di Indonesia, birokrasi seharusnya netral dan profesional, namun kenyataannya banyak birokrat terlibat politik, baik mencalonkan diri dalam pemilihan atau mendukung kandidat tertentu. Keterlibatan ini untuk melanggengkan kekuasaan dan jabatan.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk melarang keterlibatan PNS dalam politik, namun banyak birokrat tetap terjun ke politik. Contohnya di Lombok Tengah pada pilkada 2020, banyak birokrat mencalonkan diri setelah mengundurkan diri dari jabatan. Hal ini menunjukkan potensi dan jaringan yang dimiliki birokrat sangat berpengaruh dalam politik lokal.

Penelitian menunjukkan banyaknya birokrat mencalonkan diri dalam pilkada karena memiliki sumber daya, jaringan, dan pengetahuan strategis yang membuat mereka kandidat kuat. Partai politik sering merekrut birokrat sebagai calon untuk memanfaatkan potensi tersebut.

Kerangka Teoritis

Rekrutmen politik adalah fungsi penting partai politik. Menurut Dolton dan Watterberg (2000), partai politik bertugas merekrut kepemimpinan politik dan mencari jabatan publik. Miriam Budiarjo (2008) menambahkan bahwa rekrutmen politik bertujuan mencari anggota baru dan mengajak individu berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, serta menjadi cara seleksi kandidat dalam pemilu dan pemilihan legislatif.

Kandidasi, inti dari proses politik, melibatkan partai politik dalam menghadirkan calon kandidat untuk pemilu. UU No. 32/2004 Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik (Agustinus, 2009). Partai politik berkompetisi dalam pemilu untuk mendapatkan dukungan massa dan meraih kekuasaan eksekutif (Haboddin, 2008).

Peneliti menggunakan kerangka teori Vicky Randall dan Svåsand (2002) untuk menjelaskan temuan penelitian dan mencari hubungan antara keadaan ideal dan realitas. Proses pelembaan partai politik meliputi aspek internal-eksternal dan struktural-kultural. Empat dimensi yang muncul adalah: 1) Kesisteman (systemness) partai, 2) Identitas nilai (value infusion) partai, 3) Otonomi dalam pembuatan keputusan (decisional autonomy), dan 4) Citra publik (reification) partai politik.

Temuan penelitian menunjukkan hubungan patron-klien berdasarkan saling ketergantungan (Stein, 1984). Menurut James C. Scott (1972), hubungan patron-klien adalah asimetris, di mana patron memberikan perlindungan dan keuntungan material kepada klien

sebagai imbalan dukungan politik atau sosial. Patron memiliki kekuasaan dan sumber daya lebih besar, sementara klien berada dalam posisi lebih lemah. Hubungan ini bersifat personal dan saling menguntungkan (Kitschelt & Wilkinson, 2007).

Dalam konteks Pilkada di Indonesia, patron-klien memainkan peran penting dalam mobilisasi pemilih (Aspinall, 2013). Patron menggunakan jaringan sosial dan ekonomi untuk menggerakkan dukungan, sering kali memberikan bantuan langsung kepada pemilih sebagai imbalan dukungan politik (Sidel, 1999). Penelitian menunjukkan patron biasanya adalah tokoh lokal dengan pengaruh besar melalui posisi politik, kekayaan, atau hubungan keluarga (Ufen, 2006).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan mengapa birokrat mengundurkan diri dari birokrasi dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Kabupaten Lombok Tengah pada Pilkada 2020. Sebelum membahas motif tersebut, penting memahami makna motif. Motif berasal dari kata "motion" yang berarti gerakan atau perbuatan manusia.

Menurut Sobur, motif dalam psikologi adalah rangsangan atau dorongan bagi tingkah laku, sementara Walgito menjelaskan motif sebagai kekuatan internal yang mendorong tindakan. Motif adalah dorongan dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.

Hershey (2017) mengidentifikasi tiga motif politik:

1. Insentif Material:

- a. Perlindungan (Patronage): Birokrat terlibat dalam politik untuk mendapatkan perlindungan atau keamanan dari pemerintah.
- b. Kedudukan Lebih Tinggi (Preferment): Menjadi pejabat publik meningkatkan status sosial dan dihormati, membuat posisi ini diimpikan banyak orang.

2. Insentif Solidaritas: Manfaat sosial dari bergaul dengan orang lain dan menjadi bagian dari kelompok. Motif ini berkaitan dengan kebutuhan akan rasa hormat, harga diri, dan kepercayaan diri.

3. Insentif Idealisme: Kepuasan dalam mempromosikan isu atau tujuan penting, seperti memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

Keterlibatan birokrat dalam Pilkada didorong oleh motivasi untuk melanggengkan kekuasaan, meningkatkan karir, dan desakan partai politik yang melihat birokrat sebagai mesin politik efektif (Agustinus, 2009). Partai politik tertarik mencalonkan birokrat karena kemampuan mereka memobilisasi dukungan.

Motif birokrat mencalonkan diri dalam Pilkada antara lain:

1. Memperluas Kekuasaan: Masa jabatan di birokrasi hampir berakhir.
2. Pragmatisme Politik: Kesempatan memperoleh jabatan lebih tinggi.
3. Memperkaya Diri: Menambah pendapatan sebagai kepala daerah.
4. Prestise Sosial: Keinginan meningkatkan kedudukan sosial.

Teori ini digunakan untuk menganalisis faktor internal yang mendorong birokrat mencalonkan diri, dengan fokus pada motivasi untuk kekuasaan, peluang politik, keuntungan materi, dan prestise sosial.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang membangun teori dan pengetahuan berdasarkan pengalaman pribadi dan nilai sosial, serta orientasi terhadap isu politik dan perubahan (Creswell, 2010). Fokusnya adalah studi kasus Pilkada Kabupaten Lombok Tengah 2020, menganalisis secara mendalam faktor dan motif birokrat mencalonkan diri sebagai kepala daerah serta mengundurkan diri dari jabatan aparatur sipil negara.

Penelitian ini menggunakan analisis eksplanasi dan deskriptif, mengumpulkan informasi lengkap melalui dua teknik pengumpulan data:

- a. **Data Primer:** Diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan purposive sampling sesuai kriteria tertentu (Sugiyono, 2019).
- b. **Data Sekunder:** Diperoleh dari dokumentasi seperti berita elektronik, surat keputusan KPU, artikel, arsip, literatur, dan publikasi elektronik terkait studi mantan birokrat yang mencalonkan diri dalam Pilkada.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam Pilkada Lombok Tengah 2020 dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi dari sampel terkait.

Hasil dan Pembahasan

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan proses demokratis di Indonesia di mana masyarakat memilih pemimpin daerah mereka. Calon kepala daerah yang maju dalam pilkada memiliki beragam motif yang mempengaruhi keputusan mereka untuk ikut serta dalam kontestasi ini. Motif-motif ini dapat bervariasi mulai dari niat yang mulia hingga kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Artikel ini akan membahas berbagai motif yang mendorong seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam pilkada.

Salah satu motif utama bagi calon kepala daerah adalah keinginan untuk melayani masyarakat. Mereka melihat posisi sebagai kepala daerah sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerahnya. Motif ini seringkali dilandasi oleh keinginan untuk mengatasi masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh masyarakat setempat, seperti kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Calon yang memiliki latar belakang sebagai aktivis sosial, akademisi, atau profesional sering kali memiliki motif ini karena mereka melihat posisi kepala daerah sebagai platform untuk melaksanakan ide-ide mereka.

Motif kekuasaan adalah dorongan untuk mendapatkan posisi strategis yang memberikan kontrol atas sumber daya dan pengambilan keputusan. Sebagai kepala daerah, seseorang memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan yang mempengaruhi kehidupan banyak orang, dan kekuasaan ini dapat menjadi daya tarik yang kuat. Bagi beberapa calon, posisi kepala daerah dilihat sebagai batu loncatan untuk karir politik yang lebih tinggi, seperti menjadi anggota legislatif atau bahkan menjadi kepala negara. Kekuasaan juga dapat digunakan untuk memperkuat jaringan politik dan ekonomi yang mendukung kepentingan pribadi atau kelompok mereka.

Motif ekonomi berkaitan dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau ekonomi dari posisi sebagai kepala daerah. Dalam beberapa kasus, posisi kepala daerah dapat memberikan akses ke sumber daya daerah, proyek-proyek pembangunan, dan pengelolaan

anggaran yang besar. Beberapa calon mungkin terdorong untuk maju dalam pilkada dengan harapan dapat mengamankan proyek-proyek yang menguntungkan bagi mereka atau kelompok yang mereka wakili. Praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sering kali terkait dengan motif ekonomi ini, di mana calon kepala daerah berusaha memperkaya diri sendiri atau kelompoknya dengan mengorbankan kepentingan publik.

Bagi sebagian calon, pilkada merupakan ajang untuk mendapatkan popularitas dan pengakuan dari masyarakat. Posisi sebagai kepala daerah dapat meningkatkan status sosial dan memberikan pengaruh di komunitas lokal maupun nasional. Popularitas ini tidak hanya bermanfaat secara pribadi, tetapi juga dapat digunakan untuk membangun citra positif yang mendukung keberlanjutan karir politik di masa depan. Beberapa calon mungkin termotivasi oleh keinginan untuk dikenang sebagai tokoh penting di daerah mereka atau bahkan di tingkat nasional.

Calon kepala daerah juga dapat terdorong oleh motif ideologi atau keyakinan agama. Mereka mungkin melihat posisi sebagai kepala daerah sebagai cara untuk mempromosikan nilai-nilai tertentu, seperti keadilan sosial, nasionalisme, atau moralitas agama. Motif ini seringkali muncul pada calon yang berasal dari partai politik dengan basis ideologi yang kuat atau dari kelompok keagamaan. Mereka berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip ideologi atau agama dalam kebijakan publik, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Dalam beberapa kasus, calon kepala daerah mungkin maju bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena tekanan atau desakan dari kelompok tertentu, seperti partai politik, kelompok kepentingan, atau komunitas lokal. Partai politik sering kali memiliki kepentingan strategis dalam memenangkan pilkada untuk memperkuat posisi mereka di tingkat lokal atau nasional. Oleh karena itu, partai politik dapat mendorong atau bahkan memaksa seseorang yang dianggap potensial untuk maju sebagai calon kepala daerah. Tekanan ini bisa datang dari kelompok bisnis, masyarakat adat, atau organisasi sosial yang memiliki agenda tertentu yang ingin diwujudkan melalui kebijakan pemerintah daerah.

Beberapa calon kepala daerah maju dalam pilkada karena keterpanggilan pribadi yang mendalam. Mereka mungkin merasa memiliki tanggung jawab moral atau panggilan jiwa untuk memimpin dan membawa perubahan positif bagi daerah mereka. Motif ini sering kali dilandasi oleh pengalaman pribadi atau sejarah hidup yang mempengaruhi pandangan mereka tentang kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Calon dengan motif ini biasanya memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip integritas, kejujuran, dan pengabdian kepada masyarakat. Motif lain yang sering muncul dalam pilkada adalah motif keluarga dan warisan. Beberapa calon maju dalam pilkada karena berasal dari keluarga yang memiliki sejarah politik atau dinasti politik di daerah mereka. Dalam kasus ini, maju dalam pilkada adalah bagian dari melanjutkan tradisi keluarga atau mempertahankan warisan politik yang sudah ada. Motif ini juga dapat muncul ketika ada tekanan dari keluarga untuk mempertahankan kekuasaan atau pengaruh yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya.

Motif kepentingan kelompok atau korporasi juga sering menjadi alasan majunya calon kepala daerah. Calon dengan motif ini biasanya didukung oleh kelompok bisnis atau korporasi yang memiliki kepentingan besar di daerah tersebut. Mereka maju dalam pilkada dengan harapan dapat mengamankan atau mempermudah berbagai proyek bisnis atau investasi yang

menguntungkan. Dukungan dari kelompok ini sering kali disertai dengan komitmen untuk melaksanakan kebijakan yang mendukung kepentingan bisnis atau ekonomi kelompok pendukungnya.

Majunya calon kepala daerah dalam pilkada dipengaruhi oleh berbagai motif yang beragam, mulai dari niat untuk melayani publik hingga kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Memahami motif-motif ini penting untuk mengkaji dinamika politik lokal dan dampaknya terhadap kebijakan publik. Dalam konteks demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pilkada sangat penting untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok sempit.

Majunya para birokrat pada pilkada Lombok Tengah 2020 dipengaruhi oleh dua factor yaitu fakto internal dan factor eksternal. Factor internal ini berasal dari motif birokrat maju pada pilkada. Birokrat yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah memiliki motivasi utama untuk memperluas kekuasaan politik mereka. Mereka melihat pemilihan umum sebagai kesempatan untuk memasuki arena politik praktis dan mengambil alih posisi eksekutif tertinggi di daerah. Keberhasilan mereka dalam mendapatkan informasi dan pengalaman di masyarakat membuat mereka menjadi kandidat menarik bagi partai politik dan pengusaha. Para birokrat ini ingin keluar dari batasan kekuasaan yang diberikan oleh jabatan mereka dalam birokrasi dan berharap untuk memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Selain itu, mereka juga melihat posisi sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sebagai sarana untuk memperluas pengaruh mereka sendiri dan kelompok mereka, termasuk keluarga dan rekan-rekan dekat, di lingkungan pemerintah daerah.

Kultur politik ekonomistik dalam konteks Pilkada di Lombok Tengah menggambarkan kekuasaan sebagai investasi finansial. Calon Bupati/Wakil Bupati tidak terpengaruh oleh idealisme, melainkan oleh nilai ekonomi yang dihasilkan. Mereka bersedia mengeluarkan uang besar karena yakin akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Ketidakadilan sosial-ekonomi menciptakan lingkungan politik yang tidak merata dalam peluang politik. Biaya politik dalam Pilkada sangat tinggi, mencakup seluruh tahapannya, dari pencalonan hingga pemungutan suara. Modal ekonomi menjadi penentu kesuksesan kandidat. Meskipun mahal, hal ini tidak menghentikan birokrat untuk mencalonkan diri, seperti yang terlihat dalam Pilkada di Lombok Tengah yang diikuti oleh tujuh pasangan kandidat.

Praktik politik uang menjadi lazim dalam Pilkada, dengan sumbangan yang diberikan oleh pengusaha kepada pasangan calon tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan ekonomi di masa depan. Sumur daya alam yang melimpah di Lombok Tengah menjadi latar belakang bagi aliansi antara pengusaha dan kandidat, dengan harapan memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut. Meskipun demikian, kekayaan sendiri tidak selalu menjadi penentu kemenangan dalam Pilkada, seperti yang terlihat pada kasus Masrun, kandidat no urut 3, yang kekayaannya tidak cukup memengaruhi hasil pemilihan.

Dinamika pemilihan kepala daerah mencerminkan pragmatisme politik, di mana birokrat tidak hanya mewujudkan aspirasi publik, tetapi juga menjadi alat untuk mencapai ambisi pribadi dan kepentingan kandidat lain. Transformasi politik ini mengubah arena politik menjadi panggung pertarungan elit dalam mencari kekuasaan, bukan lagi tempat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Pengaruh basis pemilih sangat signifikan dalam pengusungan birokrat

sebagai calon kandidat dalam Pilkada. Dukungan politik, reputasi, kinerja, jaringan, dan lainnya memengaruhi pengusungan birokrat sebagai calon. Praktik politik pragmatis terjadi ketika partai politik mengutamakan keberhasilan dan efektivitas kepemimpinan, bukan hanya berdasarkan idealisme atau prinsip tertentu.

Partai politik menggandeng birokrat sebagai salah satu strategi untuk memenangkan Pilkada. Pilihan ini didasarkan pada keunggulan dan kelebihan yang dimiliki birokrat, seperti kinerja yang baik di Pemda dan hubungan yang baik dengan masyarakat. Aliansi antara politisi dan birokrat dianggap dapat menciptakan harmonisasi kepemimpinan yang efektif. Pragmatisme politik juga terlihat dalam pemilihan calon oleh Partai Demokrat, yang menggabungkan politisi muda dan birokrat yang tegas untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Langkah ini dianggap rasional dan berorientasi pada hasil, dengan harapan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil wawancara menegaskan bahwa fenomena pragmatisme terjadi dalam proses kandidasi oleh partai politik, dengan fokus pada memperoleh calon yang memiliki potensi untuk meraih dukungan maksimal demi kemenangan partai. Politik pragmatis ini didasarkan pada faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi tolak ukur kemenangan calon yang akan diusung. Secara keseluruhan, dinamika Pilkada mencerminkan pragmatisme politik, di mana keputusan politik didasarkan pada pertimbangan keuntungan dan hasil yang bisa diperoleh, serta adaptasi terhadap tujuan praktis dari proses tersebut.

Pemilihan kepala daerah di Lombok Tengah mencerminkan pragmatisme politik, dengan beragam motivasi bagi para birokrat yang mengajukan diri. Beberapa calon menekankan kesadaran akan tantangan yang dihadapi oleh TKI dan TKW di luar negeri, dengan komitmen untuk menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Ini dapat meningkatkan prestise sosial mereka karena menunjukkan sensitivitas terhadap masalah sosial yang relevan dan visi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Ada pula yang menekankan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan adil, dengan tujuan memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Pernyataan ini menegaskan nilai-nilai kepemimpinan yang dihargai oleh masyarakat, memberikan landasan yang kuat bagi prestise sosial calon. Namun, ada juga calon yang mengungkapkan motivasi untuk mencapai kekayaan pribadi melalui jabatan kepala daerah. Meskipun demikian, mereka menekankan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan sebagai fokus utama. Ini mencerminkan sikap pragmatis yang mengakui pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan dari faktor eksternalnya birokrat maju pada pilkada di pengaruhi oleh Ajakan partai politik, dukungan pengusaha, dukungan birokrasi lokal dan dukungan tokoh masyarakat. Penelitian ini menyoroti pragmatisme politik dalam proses kandidasi kepala daerah di Lombok Tengah. Partai politik cenderung merekrut calon kandidat yang memiliki potensi untuk memenangkan pemilu, dengan memperhatikan elektabilitas dan popularitas mereka di masyarakat. Contoh dari Masrun, seorang birokrat yang diajak oleh PKS untuk mencalonkan diri sebagai Bupati, menunjukkan praktik pragmatis dalam ajakan partai politik terhadap calon. Fenomena "buying party", di mana calon mencari dukungan dari beberapa partai politik, juga mencerminkan kekurangan kader yang kompeten dalam partai.

Kegagalan kaderisasi internal partai politik menunjukkan kelemahan dalam membangun kader berkualitas, serta kurangnya internalisasi nilai-nilai partai dan otonomi partai dalam

mengambil keputusan. Hal ini juga mencerminkan dampak politisasi birokrasi, di mana hubungan patron-klien dan praktik patronase masih dominan dalam kontestasi politik lokal.

Secara keseluruhan, temuan ini menyoroti kompleksitas dalam dinamika politik lokal, di mana partai politik, birokrat, dan aktor politik lainnya saling berinteraksi untuk mencapai kekuasaan dan memenuhi kepentingan politik mereka. Ini juga menggambarkan tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang substansial di tingkat lokal.

Modal ekonomi merupakan faktor penting dalam memengaruhi kemenangan kandidat dalam pemilihan kepala daerah. Dana kampanye sering kali berasal dari sumber pribadi kandidat dan sumbangan dari para pengusaha. Pemilihan kepala daerah memerlukan biaya besar untuk mendanai kampanye, membangun relasi dengan pendukung, dan memobilisasi dukungan. Beberapa kandidat bahkan menggunakan modal besar untuk mempengaruhi pemilih dengan memberikan uang atau barang secara langsung. Pengusaha dan birokrat memiliki hubungan timbal balik, di mana pengusaha mendukung kandidat untuk mendapatkan proyek pemerintah, sementara kandidat membutuhkan dukungan pengusaha untuk kampanye mereka.

Selama pilkada di Lombok Tengah, pengusaha terlibat dalam memberikan dukungan finansial kepada para kandidat dengan harapan mendapatkan keuntungan pasca pemilihan. Keterlibatan pengusaha dalam proses pemilihan kepala daerah dapat dianggap sebagai investasi secara tidak langsung. Namun, hubungan antara pengusaha dan birokrat juga menimbulkan kekhawatiran akan pengamanan kepentingan bisnis dan kelanggengan kekuasaan birokrat. Praktik "take and give" antara pengusaha dan birokrat dapat menimbulkan berbagai persoalan terkait keadilan, transparansi, dan integritas dalam proses pelelangan proyek. Keterlibatan birokrat dalam pilkada tidak hanya didorong oleh hasrat politik semata, tetapi juga oleh kemampuan ekonomi. Dana pendukung dari pengusaha menjadi salah satu cara untuk memudahkan langkah maju sebagai kandidat dalam pemilihan kepala daerah.

Pengusaha mendukung kandidat tertentu karena melihat potensi keuntungan ekonomi dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya lokal. Namun, keterlibatan pengusaha dalam pemilihan kepala daerah juga dapat menimbulkan masalah baru karena mereka hadir untuk mencari keuntungan, baik sebelum maupun setelah pemilihan berlangsung. Kehadiran pengusaha dapat mengurangi beban biaya politik bagi para kandidat, tetapi juga dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau bisnis.

Secara keseluruhan, hubungan antara pengusaha dan birokrat dalam konteks pemilihan kepala daerah dapat memengaruhi dinamika politik dan ekonomi di suatu daerah. Keterlibatan pengusaha dalam memberikan dukungan finansial kepada para kandidat menciptakan hubungan timbal balik yang kompleks antara bisnis dan politik, dengan potensi dampak positif maupun negatif terhadap pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan.

Para kandidat birokrat memanfaatkan dukungan dari birokrasi untuk memenangkan pemilihan. Struktur organisasi birokrasi menentukan kewenangan individu di dalamnya. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar otoritasnya. Ini menciptakan ketergantungan pada atasan karena memiliki otoritas legal. Budaya paternalistik memungkinkan birokrat memengaruhi bawahannya. Dalam beberapa kasus, birokrat menggunakan posisinya sebagai modal politik, memanfaatkan hubungan patron-klien. Bawahan dapat bekerja keras untuk mendapatkan dukungan untuk pimpinannya.

Para birokrat sering menjadi tim sukses bayangan bagi kandidat yang berasal dari birokrat. Hubungan ini terjalin jauh sebelum pemilihan kepala daerah. Meskipun terjadi polarisasi, dukungan tetap pada kandidat birokrat. Birokrat memanfaatkan sumber daya dan fasilitas instansi tempat mereka bekerja untuk kampanye. Dukungan terhadap pimpinan birokrasi menunjukkan kekentalan budaya patron-klien dalam birokrasi. Para bawahan sulit menentukan pilihan karena loyalitas pada pimpinan. Otoritas legal digunakan untuk memperoleh kekuasaan terhadap bawahan. Perilaku pemilih dari kalangan birokrasi didasari oleh alasan birokratis. Kandidat birokrat memiliki modal politik dengan dukungan dari jajaran birokrasi. Hubungan ini memberikan keuntungan timbal balik, seperti promosi jabatan, jika bawahan mendukung pimpinannya dalam pemilihan.

Penelitian ini mengungkapkan adanya hubungan patron-klien dalam teori patron-klien, di mana tokoh masyarakat seperti bangsawan dan pemuka agama membutuhkan dukungan calon pemimpin untuk mempertahankan atau memperoleh kekuasaan politik. Beberapa tokoh masyarakat berpengaruh di Lombok Tengah, seperti Lalu Wiratmaja dan Tuan Guru Gede Sakti, menjadi pertimbangan utama para kandidat dalam memenangkan Pilkada 2020. Pasangan calon, seperti Lale Prayatni dan Haji Sumum, membangun jaringan dukungan luas termasuk dari tokoh agama dan bangsawan. Mereka mendapat dukungan dari elit bangsawan pedalaman Puyung serta mantan Bupati dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB. Dukungan dari pemuka agama, terutama Gede Sakti, memberikan legitimasi dan pengaruh tambahan bagi pasangan calon ini.

Berbagai pasangan calon lainnya juga mendapatkan dukungan dari tokoh agama dan bangsawan. Strategi mereka termasuk sowan ke pemuka agama, memanfaatkan basis agama, serta menggalang dukungan dari pondok pesantren. Dukungan dari tokoh-tokoh agama ini memberikan legitimasi politik dan memperkuat posisi pasangan calon di mata pemilih. Penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa dukungan dari tokoh agama dan bangsawan memainkan peran penting dalam membentuk basis dukungan politik bagi pasangan calon dalam Pilkada Lombok Tengah. Hal ini tidak hanya memberikan legitimasi politik, tetapi juga memperkuat posisi pasangan calon di mata pemilih, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan kelompok agama dan bangsawan tersebut.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap hubungan patron-klien antara tokoh masyarakat seperti bangsawan dan pemuka agama dengan calon pemimpin dalam Pilkada Lombok Tengah 2020. Pasangan calon, seperti Lale Prayatni dan Haji Sumum, membangun jaringan dukungan dari tokoh agama dan bangsawan seperti Lalu Wiratmaja dan Tuan Guru Gede Sakti. Dukungan ini memberikan legitimasi dan pengaruh tambahan bagi pasangan calon. Strategi serupa juga digunakan oleh pasangan calon lainnya dengan mendapatkan dukungan dari tokoh agama dan bangsawan serta memanfaatkan basis agama dan pondok pesantren. Dukungan dari tokoh-tokoh agama ini tidak hanya memberikan legitimasi politik tetapi juga memperkuat posisi pasangan calon di mata pemilih, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan kelompok agama dan bangsawan tersebut.

Referensi

- Agus. (2017). Menakar Kekuatan Simbol Agama dalam Kontestasi Politik Lokal. *Tasamuh*, 14(2), 199–224.
- Agustinus, L. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Pustaka Pelajar.
- Aspinall, E. (2013). The Triumph of Capital? Class Politics and Indonesian Democratisation. *Journal of Contemporary Asia*, 43(2), 226–242. <https://doi.org/10.1080/00472336.2012.757432>
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.
- Fadli, M., Bailusy, M. K., Nas, J., & Zulfikar, A. (2018). Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015. *Aristo*, 6(2), 301. <https://doi.org/10.24269/ars.v6i2.1025>
- Firnas, M. A., & Maesarini, I. W. (2011). Evaluasi Reformasi Birokrasi: Masalah Politisasi Birokrasi dalam Politik Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 5(2), 20–35. <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/108/76>
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia: transisi menuju demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Gunanto, D. (2020). Politisasi Birokrasi Dalam Pelaksanaan Pilkada di Indonesia. *Independen (Jurnal Politik Indonesia Global)*, 1(2), 87–94. <https://doi.org/10.24853/independen.1.2.87-94>
- Haboddin, M. (2008). *Rekayasa Oilitik dari Pemilu ke Pilkada : Kontribusi Partai Politik Dalam Pilkada*. IPD.
- Hershey, M. R. (2017). *Party Politics in America* (17th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315544427>
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2007). *Patrons, clients and policies: Patterns of democratic accountability and political competition*. Cambridge University Press.
- Kurniawan, R. C. (2018). The Pattern of Clientelism in Lampung Local Election. *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 34(2), 283–291. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v34i2.3432>
- Mahadi, H. (2011). Pragmatisme Politik : Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDI-P Pada Pilkada , Kabupaten Sleman. *Journal of Government and Politics*, 2(1), 35–66. <https://doi.org/10.18196/jgp.2011.0004>
- Margiansyah, D. (2019). Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 47. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.783>
- Marx, F. M. (1957). *The administrative state: an introduction to bureaucracy*. University of Chicago Press.
- Mietzner, M. (2009). Indonesia's 2009 elections: Populism, dynasties and the consolidation of the party system. *Lowy Institute for International Policy*, 19(May), 1–22.
- Mutawalli, M., Ayub, Z. A., & Faga, H. P. (2023). Revitalizing Political Parties in Indonesia: Dissecting Patronage-Clientelism Dynamics vis-à-vis Political Representation. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 2(2), 301–326. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i2.467>
- Prianto, B. (2016). Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi Rijal. *Publisia Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 105–117. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v1i2.436>
- Randall, V., & Svåsand, L. (2002). Party Institutionalization in New Democracies. *Party Politics*, 8(1), 5–29.

- Risal, S., Herry Bajari, A., & Hergianasari, P. (2022). Sumber Daya Alam Dalam Pusaran Pilkada Serentak. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(02), 135–148. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i02.3948>
- Rusdin, R. B. (2011). *Birokrat Dalam Pusaran Politik (Studi Tentang Pencalonan Birokrat Dalam Pemilukada Di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tahun 2010*. Universitas Gadjah Mada.
- Rusdiyani, N. (2020). *KASN-Bawaslu Rilis Data Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2019 dan 2020*. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). <https://ppid.kasn.go.id/kasn-bawaslu-rilis-data-pengawasan-netralitas-asn-tahun-2019-dan-2020/>
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi pelayanan publik: konsep, teori, dan aplikasi*. Deepublish.
- Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *American Political Science Review*, 66(1), 91–113.
- Sembiring, W. M. (2020). Birokrasi dan Kekuasaan Politik Lokal: Politisasi Birokrasi atau Birokrasi Berpolitik? *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), 295–299.
- Sidel, J. T. (1999). *Capital, coercion, and crime: Bossism in the Philippines*. Stanford University Press.
- Stein, H. F. (1984). A note on patron-client theory. *Ethos*, 12(1), 30–36.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D* (Sutopo (ed.)). Alfabeta.
- Syamsuadi, A., & Yahya, M. R. (2018). Model Kandidasi Birokrat Oleh Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. *Journal of Governance*, 3(2). <https://doi.org/10.31506/jog.v3i2.3868>
- Taj, A., Abdullah, F., & Khan, S. (2017). Political Clientelism : Beyond the Public Choice Explanation. *Journal of Humanities and Social Sciences*, 25, 109–124.
- Taufiq Kurniawan, Bayu Islam Assasaki, & Sulhairi, S. (2023). Gelar Lalu Baiq Suku Sasak: Antara Simbol Kebangsaan atau Penurunan Kasta Sosial. *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 2(1), 235–250. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v2i1.1298>
- Thoha, M. (2003). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. PT Grafindo Perkasa Press.
- Tjokroamidjojo, B. (1984). *Pengantar administrasi pembangunan*. LP3ES.
- TRD, T., Zetra, A., & Asrinaldi, A. (2022). Upaya Depolitisasi Birokrasi oleh Birokrasi Pemerintah Kota Padang Melalui Pemilu Gubernur Sumatera Barat 2020. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 4(1), 58–68. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v4i1.272>
- Ufen, A. (2006). *Political Parties in Post-Suharto Indonesia : Between politik aliran and ' Philippinisation ' Andreas Ufen* (Issue December).
- Wahyudi, L. (2018). Politisasi birokrasi lokal dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. *Jurnal Paradigma*, 7(3), 155–164.
- Wahyudin, D. (2017). Identitas Orang Sasak: Studi Epistemologis Terhadap Mekanisme Produksi Pengetahuan Masyarakat Suku Sasak Di Pulau Lombok NTB. *El-TsaQafah*, XVI(2), 103–113.
- Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization*. Free Press-Collier Macmillan.